POHON KINERJA
DEPUTI ADMINISTRASI DPD RI

Terwujudnya peran DPD RI sesuai aspirasi daerah
IK : Nilai aspirasi masyarakat dan daerah yang menjadi produk DPD RI

Terwujudnya tata kelola DPD RI yang efektif
IK : 1) Nilai Reformasi Birokrasi (RB) (S_{ss})

PK Pimpinan Lembaga / Eselon I.a / Kinerja Strategis

PK Pimpinan Lembaga / Eselon I.a / Kinerja Strategis

Meningkatnya efektivitas tata kelola DPD RI
IK : Nilai RB General (P_{ss})

Meningkatnya upaya mengatasi permasalahan tata kelola pemerintah
IK : Nilai RB Tematik (P_{ss})

PK Eselon I.b/ Kinerja Taktis

PK Eselon I.b/ Kinerja Taktis

Meningkatnya efektifitas sistem dan tata kelola Setjen DPD RI IK : 1) Nilai capaian RB pengelolaan organisasi (K_{ss}), 2) Nilai capaian RB pengelolaan SDM (K_{ss}), 3) Nilai capaian RB pengelolaan kinerja (K_{ss}), 4) Nilai capaian RB pengelolaan keuangan (K_{ss}), 5) Nilai capaian RB digitalisasi pemerintahan (K_{ss}), 6) Nilai capaian RB pelayanan informasi publik (K_{ss}), 7) Nilai capaian RB pelayanan informasi publik di daerah pemilihan (K_{ss}), 8) Nilai capaian RB pengelolaan layanan umum, sarana prasana di kantor pusat (K_{ss}), 9) Nilai capaian RB pengelolaan sarana dan prasarana di kantor ibukota provinsi (K_{ss}), 10) Nilai capaian RB pengawasan Internal (K_{ss})

Meningkatnya kualitas upaya untuk mengurai, menjawab dan mengatasi permasalahan tata kelola pemrintah yang dirasakan langsung oleh masyarakat
IK : 1) Nilai capaian RB upaya mengatasi permasalahan tata kelola pemerintahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat (K_{ss})

PK Eselon II / Kinerja Operasional

PK Eselon II / Kinerja Operasional

Terlaksananya pengelolaan organisasi yang tepat fungsi
IK : 1) Rencana Aksi Pembangunan RB General, 2) Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General, 3) Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi, 4) Indeks Pelayanan Publik, 5) Indeks Kualitas Kebijakan, 6) Survei Kepuasan Masyarakat

Terlaksananya pengelolaan sumber daya manusia yang profesional
IK : 1) Indeks sistem merit, 2) Indeks berAKHLAK

Terlaksananya pengelolaan perencanaan, anggaran dan kinerja yang berkualitas
IK : 1) Nilai SAKIP, 2) Indeks perencanaan pembangunan nasional (IPPN)

Terlaksananya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
IK : 1) Indikator kinerja pelaksanaan anggaran, 2) Opini BPK

Terlaksananya pengelolaan prioritas nasional
IK : 1) Capaian Prioritas Nasional, 2) Capaian IKU Kementerian/Lembaga

Terlaksananya digitalisasi tata kelola pemerintahan
IK : 1) Tingkat implementasi kebijakan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik/Tingkat implementasi kebijakan arsitektur pemerintahan digital, 2) Tingkat digitalisasi arsip, 3) Indeks pembangunan statistik, 4) Indeks SPBE/Indeks Pemerintahan Digital

Terlaksananya pelayanan informasi publik yang transparan dan responsif
IK : 1) Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR!) yang sudah diselesaikan, 2) Indeks pelayanan publik

Terlaksananya pelayanan informasi publik yang transparan dan responsif di daerah pemilihan
IK : 1) Indeks pelayanan publik di kantor daerah

Terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana sesuai standar di Ibukota Negara
IK : 1) Indeks pengelolaan aset,

Terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana sesuai standar di Ibukota provinsi
IK : 1) Indeks tata kelola pengadaan

Terlaksananya pengawasan internal yang independen
IK : 1) Tingkat maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), 2) Tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas (ZI), 3) Tingkat tindak lanjut rekomendasi, 4) Survei penilaian integritas

Terlaksananya upaya mengatasi permasalahan tata kelola pemerintahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat
IK : 1) Pengentasan kemiskinan / Peningkatan kemiskinan, 2) Realisasi investasi / Peningkatan Investasi, 3) Digitalisasi administrasi pemerintahan berfokus penanganan stunting/Digitalisasi administrasi pemerintahan, 4) Penguatan produk dalam negeri / Pengelolaan sumber daya alam dan hilirisasi, 5) Laju inflasi/Percepatan prioritas aktual presiden

Output

Output